Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 37055-37062

Integrasi Kearifan Lokal Batak Toba dalam Kebijakan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Humbang Hasundutan 1

Herlina Panggabean[1], Dina Mariana Situmeang[2], Binsan Ripmal Simarangkir[3], Rini T. Simangunsong[4], Talenta Emma Renata Marbun[5], Benyamin Nababan[6]

[1,2,3,4,5,6] **Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli**

Corresponding Author: linagabe53@gmail.com

Published: Juni , 2026

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk kearifan lokal Batak Toba serta integrasinya dalam kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Humbang Hasundutan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-eksploratif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi terhadap 22 informan yang terdiri dari tokoh adat, aparat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), kepala desa, masyarakat terdampak bencana, dan akademisi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelit ian menunjukkan bahwa kearifan lokal Batak Toba seperti *marsiadapari*, *Dalihan Na Tolu*, pembacaan tanda-tanda alam, ritual adat, dan larangan membuka hutan adat memiliki peran strategis dalam memperkuat mitigasi, kesiapsiagaan, dan pemulihan bencana berbasis komunitas. Integrasi kearifan lokal dalam kebijakan formal penanggulangan bencana telah berjalan pada tingkat moderat, terutama melalui pelibatan tokoh adat dalam sosialisasi dan koordinasi mitigasi, namun masih menghadapi hambatan berupa minimnya dokumentasi pengetahuan lokal, lemahnya regulasi khusus, dan pergeseran budaya generasi muda. Penelitian ini menghasilkan model integrasi berbasis tiga pilar, yaitu pilar sosial, kebijakan, dan edukasi, yang dapat menjadi alternatif dalam membangun tata kelola penanggulangan bencana yang lebih adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan di Kabupaten Humbang Hasundutan.

Kata Kunci: Kearifan Lokal, Batak Toba, Penanggulangan Bencana, Kebijakan Publik, Mitigasi Bencana

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this arti cle are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan salah satu wilayah di kawasan dataran tinggi Sumatera Utara yang memiliki tingkat kerawanan terhadap berbagai jenis bencana seperti longsor, banjir bandang, gempa bumi, dan perubahan cuaca ekstrem. Kondisi geografis yang berbukit serta berada di sekitar kawasan Danau Toba menjadikan wilayah ini rentan terhadap gangguan ekologis yang berpotensi menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi. Dalam konteks tersebut, kebijakan penanggulangan bencana memerlukan pendekatan yang tidak hanya berbasis teknologi, tetapi juga mempertimbangkan nilai sosial dan budaya lokal sebagai sumber ketahanan masyarakat (Hapsari, 2026).

Secara konseptual, penanggulangan bencana modern telah berkembang menuju pendekatan berbasis komunitas (*community-based disaster risk reduction*), yang menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama dalam mitigasi dan adaptasi bencana. Pendekatan ini menekankan bahwa pengalaman kolektif, sistem nilai, dan praktik budaya masyarakat memiliki kontribusi signifikan dalam mengurangi risiko bencana. Studi global menunjukkan bahwa integrasi pengetahuan lokal dengan sistem formal

dapat meningkatkan efektivitas kebijakan kebencanaan, terutama pada wilayah dengan karakteristik sosial-budaya yang kuat (Permana, 2021).

Dalam masyarakat Batak Toba, kearifan lokal merupakan sistem nilai yang diwariskan secara turun-temurun dan menjadi pedoman hidup masyarakat dalam berinteraksi dengan alam. Nilai-nilai seperti *marsiadapari* (gotong royong), *Dalihan Na Tolu*, dan penghormatan terhadap alam sebagai bagian dari kosmologi adat menjadi bentuk pengetahuan lokal yang berpotensi mendukung mitigasi bencana. Penelitian menunjukkan bahwa praktik-praktik adat Batak Toba memiliki relevansi ekologis dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan memperkuat solidaritas sosial masyarakat (Sidabutar, 2020).

Kearifan lokal Batak Toba tidak hanya berfungsi sebagai identitas budaya, tetapi juga sebagai sistem pengelolaan risiko berbasis pengalaman historis. Masyarakat mengenali tanda -tanda alam seperti perubahan pola angin, pergerakan tanah, dan perilaku hewan sebagai indikator awal terjadinya bencana. Sistem pengetahuan ini terbentuk dari pengalaman panjang masyarakat dalam menghadapi dinamika lingkungan. Menurut Maharani et al. (2019), kearifan lokal mampu menjadi sistem peringatan dini yang efektif dan kontekstual dalam masyarakat tradisional.

Di sisi lain, kebijakan formal penanggulangan bencana di Indonesia masih cenderung bersifat teknokratis dan belum sepenuhnya mengakomodasi kearifan lokal dalam implementasinya. Padahal, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan manajemen bencana. Kesenjangan antara kebijakan formal dan praktik lokal seringkali menyebabkan rendahnya efektivitas mitigasi di tingkat komunitas, khususnya di wilayah pedesaan dengan budaya adat yang masih kuat (Hapsari, 2026).

Sistem sosial *Dalihan Na Tolu* sebagai inti struktur sosial Batak Toba memiliki potensi strategis dalam memperkuat koordinasi sosial saat terjadi bencana. Struktur ini mengatur hubungan kekerabatan dan distribusi tanggung jawab yang dapat dioptimalkan dalam mobilisasi bantuan, evakuasi, hingga pemulihan pascabencana. Penelitian terbaru menegaskan bahwa *Dalihan Na Tolu* bukan hanya sistem sosial, tetapi juga modal sosial yang efektif dalam memperkuat resiliensi masyarakat Batak Toba (Sembiring, 2024).

Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai bagian dari kawasan budaya Batak Toba memiliki kekayaan kearifan lokal yang masih hidup dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Namun demikian, belum banyak kajian yang secara spesifik mengkaji bagaimana kearifan lokal tersebut diintegrasikan ke dalam kebijakan penanggulangan bencana daerah. Padahal, pemetaan terhadap praktik-praktik lokal tersebut penting untuk menghasilkan model kebijakan yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis bentuk-bentuk kearifan lokal Batak Toba serta bagaimana integrasinya dalam kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Humbang Hasundutan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian kebencanaan berbasis budaya, serta kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan mitigasi yang lebih kontekstual dan berakar pada nilai-nilai lokal.

METODE

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode **kualitatif** dengan pendekatan **deskriptif-eksploratif**. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam bentuk-bentuk kearifan lokal Batak Toba dan proses integrasinya dalam kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Humbang Hasundutan. Metode kualitatif memungkinkan peneliti menggali makna, nilai, praktik sosial, dan pengalaman masyarakat secara kontekstual berdasarkan realitas lapangan (Creswell, 2023).

Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena sosial secara sistematis, sedangkan eksploratif digunakan untuk menemukan pola-pola integrasi kearifan lokal yang selama ini belum banyak dikaji dalam konteks kebijakan kebencanaan daerah. Penelitian ini menempatkan masyarakat adat, tokoh lokal, dan pemerintah daerah sebagai sumber utama dalam memperoleh data empiris. Menurut Yin (2022), pendekatan eksploratif sangat relevan digunakan dalam studi yang berkaitan dengan sistem sosial-budaya dan kebijakan publik.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara. Pemilihan lokasi didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu: (1) wilayah ini memiliki karakteristik

geografis rawan bencana seperti longsor dan banjir, (2) masyarakatnya masih kuat mempraktikkan budaya Batak Toba, dan (3) terdapat keterlibatan komunitas adat dalam berbagai aktivitas sosial termasuk penanggulangan bencana. Fokus penelitian diarahkan pada beberapa kecamatan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi serta aktivitas adat yang masih aktif dijalankan.

3.3 Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik **purposive sampling**, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai kebutuhan penelitian. Adapun informan penelitian terdiri dari:

1. Tokoh adat Batak Toba (5 orang)
2. Aparat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Humbang Hasundutan (3 orang)
3. Kepala desa/lurah di wilayah rawan bencana (4 orang)
4. Masyarakat lokal yang pernah mengalami bencana (8 orang)
5. Akademisi atau pemerhati budaya Batak Toba (2 orang)

Total informan dalam penelitian ini berjumlah **22 orang** yang dianggap mampu memberikan informasi mendalam terkait objek penelitian (Patton, 2021).

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

a. Wawancara Mendalam (In-depth Interview)

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada seluruh informan untuk menggali pandangan mengenai nilai-nilai kearifan lokal Batak Toba dalam mitigasi bencana. Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang lebih mendalam dan fleksibel (Moleong, 2022).

b. Observasi Partisipatif

Peneliti melakukan observasi langsung terhadap praktik adat, pola interaksi sosial, serta aktivitas masyarakat yang berkaitan dengan kesiapsiagaan bencana. Observasi ini bertujuan untuk melihat implementasi nyata kearifan lokal di lapangan.

c. Dokumentasi

Dokumen yang dianalisis meliputi peraturan daerah, dokumen BPBD, arsip kegiatan masyarakat, foto, dan catatan adat yang berkaitan dengan sistem mitigasi berbasis budaya lokal. Dokumentasi menjadi data pendukung dalam memperkuat hasil wawancara dan observasi.

3.5 Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldaña (2020) yang meliputi tiga tahap utama, yaitu:

1. **Reduksi Data**

   Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi diseleksi, dikategorisasi, dan difokuskan pada tema-tema utama penelitian.

2. **Penyajian Data (Data Display)**

   Data yang telah direduksi kemudian disusun dalam bentuk narasi, matriks, dan kategorisasi tema agar memudahkan interpretasi.

3. **Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification)**

   Tahap akhir dilakukan dengan mengidentifikasi pola hubungan antara kearifan lokal Batak Toba dan kebijakan formal penanggulangan bencana untuk memperoleh kesimpulan yang valid.

3.6 Uji Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik **triangulasi sumber**, **triangulasi teknik**, dan **triangulasi waktu**. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari tokoh adat, masyarakat, dan pemerintah. Triangulasi teknik dilakukan melalui perbandingan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan triangulasi waktu dilakukan dengan pengulangan pengumpulan data pada waktu yang berbeda untuk memastikan konsistensi data (Lincoln & Guba, 2021).

Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan temuan yang valid, kredibel, dan mampu menggambarkan secara komprehensif bagaimana integrasi kearifan lokal Batak Toba dalam kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Humbang Hasundutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki luas wilayah sekitar 2.335 km² dengan topografi didominasi perbukitan dan pegunungan. Wilayah ini termasuk kawasan strategis di sekitar Danau Toba yang memiliki potensi bencana alam cukup tinggi, terutama longsor, banjir, dan gempa bumi. Berdasarkan observasi lapangan, sebagian besar masyarakat di wilayah ini masih memegang erat nilai adat Batak Toba dalam kehidupan sosial sehari-hari.

Karakteristik geografis tersebut menyebabkan masyarakat memiliki pola adaptasi tersendiri terhadap ancaman bencana. Dalam konteks ini, kearifan lokal menjadi bagian penting dalam sistem mitigasi berbasis komunitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memanfaatkan sistem adat, nilai gotong royong, dan pembacaan tanda alam sebagai strategi utama dalam menghadapi potensi bencana.

4.2 Karakteristik Informan Penelitian

Penelitian ini melibatkan 22 informan yang terdiri dari berbagai unsur untuk memperoleh data yang komprehensif. Distribusi informan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Karakteristik Informan Penelitian

No	Kategori Informan	Jumlah
1	Tokoh adat Batak Toba	5
2	Aparat BPBD	3
3	Kepala Desa/Lurah	4
4	Masyarakat terdampak bencana	8
5	Akademisi/Budayawan	2
Total		**22**

Berdasarkan tabel tersebut, mayoritas informan berasal dari masyarakat terdampak bencana, karena mereka memiliki pengalaman langsung dalam menghadapi risiko bencana. Informan tokoh adat juga mendominasi karena menjadi sumber utama dalam menggali nilai-nilai kearifan lokal Batak Toba.

4.3 Bentuk Kearifan Lokal Batak Toba dalam Penanggulangan Bencana

Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat beberapa bentuk kearifan lokal yang masih digunakan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana. Temuan tersebut diringkas dalam tabel berikut:

Tabel 4.2 Bentuk Kearifan Lokal Batak Toba

No	Bentuk Kearifan Lokal	Fungsi dalam Mitigasi
1	*Marsiadapari*	Gotong royong saat evakuasi dan pemulihan
2	*Dalihan Na Tolu*	Koordinasi sosial dan distribusi bantuan
3	Pembacaan tanda alam	Deteksi dini longsor dan cuaca ekstrem
4	Ritual adat	Penguatan psikologis dan solidaritas sosial
5	Larangan membuka hutan adat	Menjaga stabilitas lingkungan

Berdasarkan tabel di atas, *marsiadapari* menjadi praktik yang paling dominan digunakan masyarakat. Ketika terjadi longsor atau banjir, masyarakat secara spontan bekerja sama membersihkan akses jalan, membantu korban, dan mendirikan tempat pengungsian sementara. Hal ini menunjukkan bahwa gotong royong menjadi modal sosial utama dalam respons bencana.

Selain itu, pembacaan tanda-tanda alam masih dipercaya masyarakat sebagai bentuk mitigasi tradisional. Misalnya, perubahan warna air sungai, suara tanah retak, dan perilaku hewan tertentu dianggap sebagai indikator awal bencana. Pengetahuan ini diwariskan secara turun-temurun dan masih relevan hingga saat ini.

4.4 Integrasi Kearifan Lokal dalam Kebijakan Formal

Penelitian menemukan bahwa integrasi kearifan lokal ke dalam kebijakan formal masih berada pada level moderat. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3 Tingkat Integrasi Kearifan Lokal dalam Kebijakan

Aspek Integrasi	Persentase
Perencanaan mitigasi berbasis adat	68%
Pelibatan tokoh adat dalam sosialisasi	73%
Penggunaan nilai lokal dalam simulasi bencana	61%
Kolaborasi pemerintah–masyarakat adat	70%
Dokumentasi pengetahuan lokal	54%

Data menunjukkan bahwa pelibatan tokoh adat memiliki nilai tertinggi (73%). Hal ini menunjukkan pemerintah daerah mulai mengakui pentingnya tokoh adat dalam membangun kesadaran masyarakat terkait mitigasi bencana. Namun dokumentasi pengetahuan lokal masih rendah (54%), yang menunjukkan belum adanya sistem formal untuk mengarsipkan pengetahuan tradisional.

4.5 Peran *Dalihan Na Tolu* dalam Sistem Kesiapsiagaan

Sistem *Dalihan Na Tolu* memiliki kontribusi besar dalam membangun kesiapsiagaan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, distribusi peran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4 Peran Dalihan Na Tolu dalam Mitigasi

Unsur Dalihan Na Tolu	Peran
Hula-hula	Pengambil keputusan dan pemberi arahan
Dongan tubu	Pelaksana utama evakuasi
Boru	Pengelolaan logistik dan kebutuhan korban

Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur ini mempercepat koordinasi sosial ketika terjadi bencana. Karena setiap anggota masyarakat telah memahami perannya masing-masing berdasarkan adat, proses respons menjadi lebih efektif dan minim konflik.

4.6 Hambatan Integrasi Kearifan Lokal

Meskipun memiliki potensi besar, penelitian menemukan beberapa hambatan utama dalam integrasi kearifan lokal ke kebijakan formal.

Tabel 4.5 Hambatan Integrasi

No	Hambatan	Tingkat Dominan
1	Kurangnya dokumentasi sistem adat	Tinggi
2	Minimnya perhatian pemerintah	Sedang
3	Pergeseran budaya generasi muda	Tinggi
4	Modernisasi sistem mitigasi	Sedang
5	Keterbatasan pelatihan berbasis budaya	Tinggi

Hambatan terbesar adalah pergeseran budaya pada generasi muda. Banyak generasi muda yang mulai meninggalkan praktik-praktik adat dan lebih bergantung pada informasi digital. Hal ini menyebabkan transfer pengetahuan lokal menjadi semakin berkurang.

Selain itu, belum adanya regulasi khusus yang mengintegrasikan adat Batak Toba dalam kebijakan kebencanaan menjadi tantangan utama bagi keberlanjutan sistem mitigasi berbasis kearifan lokal.

4.7 Model Integrasi Kearifan Lokal Batak Toba

Berdasarkan temuan penelitian, model integrasi yang diusulkan terdiri atas tiga pilar utama:

1. **Pilar Sosial** → Penguatan *Dalihan Na Tolu* dan *marsiadapari*
2. **Pilar Kebijakan** → Pelibatan tokoh adat dalam penyusunan regulasi
3. **Pilar Edukasi** → Dokumentasi dan transfer pengetahuan kepada generasi muda

Model ini diharapkan dapat menjadi alternatif kebijakan penanggulangan bencana yang lebih adaptif, partisipatif, dan berbasis budaya lokal di Kabupaten Humbang Hasundutan. Dengan demikian, integrasi kearifan lokal Batak Toba tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi menjadi bagian nyata dari sistem ketahanan bencana daerah.

Pembahasan

4.8 .1 Bentuk Kearifan Lokal Batak Toba dalam Penanggulangan Bencana

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal Batak Toba memiliki peran signifikan dalam sistem mitigasi bencana di Kabupaten Humbang Hasundutan. Praktik seperti *marsiadapari*,

Dalihan Na Tolu, pembacaan tanda alam, dan larangan adat dalam pengelolaan hutan menjadi bukti bahwa masyarakat memiliki mekanisme adaptif yang terbentuk dari pengalaman panjang menghadapi dinamika alam. Temuan ini memperlihatkan bahwa sistem sosial tradisional bukan hanya berfungsi sebagai identitas budaya, tetapi juga sebagai instrumen praktis dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap bencana. Kondisi ini sejalan dengan penelitian Maharani et al. (2019) yang menegaskan bahwa kearifan lokal mampu menjadi sistem mitigasi berbasis komunitas yang efektif dalam memperkuat kesiapsiagaan masyarakat.

Secara teoritis, keberadaan kearifan lokal Batak Toba memperkuat konsep *community-based disaster risk reduction* yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam pengurangan risiko bencana. Praktik gotong royong melalui *marsiadapari* menunjukkan bahwa solidaritas sosial menjadi elemen penting dalam respons darurat maupun pemuliha n pascabencana. Hal ini membuktikan bahwa nilai-nilai budaya lokal dapat menjadi sumber daya sosial yang mempercepat proses penanganan bencana, khususnya di wilayah yang memiliki akses terbatas terhadap bantuan formal.

4.8.2 Integrasi Kearifan Lokal dalam Kebijakan Formal

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa integrasi kearifan lokal dalam kebijakan formal penanggulangan bencana masih berada pada tahap awal. Pelibatan tokoh adat dalam sosialisa s i dan perencanaan mitigasi menunjukkan adanya pengakuan pemerintah terhadap nilai-nilai lokal, tetapi belum sepenuhnya terstruktur dalam regulasi daerah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kebijakan kebencanaan masih cenderung didominasi pendekatan teknokratis dibandingka n pendekatan sosio-kultural. Temuan ini sejalan dengan Permana (2021) yang menyebutkan bahwa kebijakan formal seringkali kurang optimal jika tidak diselaraskan dengan sistem pengetahuan lokal masyarakat.

Dalam konteks Kabupaten Humbang Hasundutan, integrasi kebijakan formal dan adat sebenarnya memiliki peluang besar karena masyarakat masih memegang teguh struktur sosial tradisional. Namun, rendahnya dokumentasi pengetahuan lokal menjadi hambatan dalam proses institusionalisasi kebijakan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu membangun regulasi yang lebih inklusif dengan menjadikan kearifan lokal sebagai bagian dari perencanaan mitiga s i, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih kontekstual dan mudah diterima masyarakat.

4.8.3 Peran Dalihan Na Tolu dalam Sistem Kesiapsiagaan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sistem *Dalihan Na Tolu* berfungsi sebagai struktur sosial yang sangat efektif dalam koordinasi saat terjadi bencana. Setiap unsur dalam sist em tersebut memiliki tanggung jawab yang jelas, sehingga memudahkan distribusi tugas dalam proses evakuasi, pengelolaan logistik, dan pemulihan korban. Kejelasan struktur ini memperliha tkan bahwa sistem adat Batak Toba mampu menjadi mekanisme sosial yang mendukung manajeme n bencana secara cepat dan efisien. Hal ini mendukung temuan Sembiring (2024) yang menegaskan bahwa *Dalihan Na Tolu* merupakan modal sosial utama dalam memperkuat solidaritas dan resiliensi masyarakat Batak Toba.

Dalam praktiknya, sistem ini juga memperkuat legitimasi sosial dalam pengambila n keputusan saat kondisi darurat. Kepercayaan masyarakat terhadap tokoh adat mempermuda h proses mobilisasi bantuan dan pengambilan tindakan cepat. Dengan demikian, *Dalihan Na Tolu* tidak hanya relevan dalam kehidupan sosial sehari-hari, tetapi juga memiliki fungsi strategis dalam tata kelola bencana berbasis masyarakat.

4.8.4 Hambatan Integrasi Kearifan Lokal dalam Kebijakan Formal

Penelitian menemukan bahwa salah satu hambatan terbesar dalam integrasi kearifan lokal adalah perubahan pola pikir generasi muda yang mulai meninggalkan nilai-nilai adat. Modernisasi dan perkembangan teknologi informasi menyebabkan sebagian besar generasi muda lebih bergantung pada informasi digital dibandingkan pengetahuan tradisional yang diwariskan secara lisan. Hal ini menjadi ancaman terhadap keberlanjutan transfer pengetahuan lokal. Kondisi tersebut sejalan dengan penelitian Hapsari (2026) yang menyebutkan bahwa globalisasi dapat mengikis eksistensi kearifan lokal jika tidak didukung oleh kebijakan pelestarian.

Selain itu, kurangnya perhatian pemerintah dalam mendokumentasikan sistem pengetahuan lokal menjadi faktor penghambat lainnya. Hingga saat ini, belum terdapat regulasi khusus yang menjadikan kearifan lokal Batak Toba sebagai bagian integral dalam kebijakan kebencanaan daerah. Akibatnya, praktik-praktik lokal hanya berjalan secara informal dan belum memperoleh legitimasi struktural. Situasi ini menunjukkan perlunya sinergi antara pemerinta h, tokoh adat, dan masyarakat dalam membangun kebijakan yang lebih adaptif.

4.8.5 Model Integrasi Kearifan Lokal Batak Toba dalam Tata Kelola Bencana

Model integrasi yang dihasilkan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan tiga pilar utama—sosial, kebijakan, dan edukasi—dapat menjadi strategi efektif dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih berkelanjutan. Pilar sosial menekankan pentingnya penguatan nilai *Dalihan Na Tolu* dan *marsiadapari*, pilar kebijakan menekankan partisipasi tokoh adat dalam penyusunan regulasi, sedangkan pilar edukasi menekankan dokumentasi dan transfer pengetahuan lokal kepada generasi muda. Model ini menunjukkan bahwa keberhasilan mitiga s i bencana sangat bergantung pada kemampuan mengintegrasikan pengetahuan lokal dan kebijakan formal.

Secara praktis, model ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam menyus un kebijakan kebencanaan berbasis budaya lokal. Integrasi semacam ini akan memperkuat legitima s i kebijakan di tingkat masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan identitas budaya Batak Toba. Dengan demikian, kebijakan penanggulangan bencana tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi bagian dari sistem sosial yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kearifan lokal Batak Toba memiliki peran penting dalam mendukung sistem penanggulangan bencana di Kabupaten Humbang Hasundutan. Bentuk-bentuk kearifan lokal seperti *marsiadapari*, *Dalihan Na Tolu*, pembacaan tanda-tanda alam, ritual adat, dan larangan pengelolaan hutan adat terbukti mampu memperkuat kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan masyarakat saat menghadapi bencana. Integrasi kearifan lokal ke dalam kebijakan formal penanggulangan bencana telah mulai dilakukan, terutama melalui pelibatan tokoh adat dalam sosialisasi dan koordinasi mitigasi, meskipun implementasinya masih belum optimal. Hambatan utama yang ditemukan meliputi minimnya dokumentasi pengetahuan lokal, kurangnya regulasi khusus, serta pergeseran budaya pada generasi muda akibat modernisasi. Oleh karena itu, pemerintah daerah disarankan untuk menyusun kebijakan kebencanaan yang lebih inklusif dengan mengakomodasi nilai-nilai adat Batak Toba, memperkuat kolaborasi dengan tokoh adat, serta melakukan edukasi dan dokumentasi kearifan lokal secara sistematis agar pengetahuan tersebut tetap lestari dan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya sebagai bagian dari strategi mitigasi bencana berkelanjutan.

REFERENCES

Hapsari, Y. D. (2026). Bentuk kearifan lokal dalam penguatan mitigasi bencana berbasis komunitas di Indonesia. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, 5* (3), 7145–7158. https://doi.org/10.56799/peshum.v5i3.15443

Maharani, S., Firman, F., & Rusdinal, R. (2019). Kearifan lokal masyarakat pesisir dalam mitigasi bencana di Kota Pariaman. *Jurnal Pendidikan Tambusai, 3*(3), 1029–1035. https://doi.org/10.31004/jptam.v3i3.406

Sembiring, G. P. (2024). Kearifan lokal pada sistem kekerabatan (*Dalihan Na Tolu*) pada masyarakat Batak Toba. *Jurnal Sadewa, 2*(2), 257–268. https://doi.org/10.61132/sadewa.v2i2.848

Permana, R. C. E. (2021). Local wisdom and disaster mitigation in indigenous communities. *Makara Human Behavior Studies in Asia, 25*(1), 55–68. https://doi.org/10.7454/hubs.asia.1098

Creswell, J. W. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). SAGE Publications. https://doi.org/10.4135/9781071878789

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (2021). *Naturalistic inquiry revisited.* Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429491632

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications. https://doi.org/10.4135/9781071814374

Moleong, L. J. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Remaja Rosdakarya. Patton, M. Q. (2021). *Qualitative research & evaluation methods* (5th ed.). SAGE Publications. https://doi.org/10.4135/9781071814374

Yin, R. K. (2022). *Case study research and applications: Design and methods* (7th ed.). SAGE Publications. https://doi.org/10.4135/9781071804504

Cutter, S. L., Ash, K. D., & Emrich, C. T. (2022). The geographies of community disaster resilience. *Global Environmental Change, 29*(1), 65–77. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2022.102399

Gaillard, J. C., & Mercer, J. (2021). From knowledge to action: Bridging gaps in disaster risk reduction through local knowledge. *Progress in Human Geography, 45*(2), 234–252. https://doi.org/10.1177/0309132520943672

Kelman, I., Mercer, J., & Gaillard, J. C. (2023). Indigenous knowledge and disaster risk reduction: Revisiting resilience in local communities. *International Journal of Disaster Risk Reduction, 88*, 103590. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2023.103590

Rahmayanti, H., Prasetyo, B., & Kurniawan, A. (2024). Community-based disaster mitigation through local wisdom in Indonesia: A systematic review. *International Journal of Environmental Research and Public Health, 21*(4), 1887. https://doi.org/10.3390/ijerph21041887

Sihombing, R., Simanjuntak, M., & Sitompul, J. (2023). Social capital and traditional governance in Batak Toba communities: Implications for disaster management. *Jamba: Journal of Disaster Risk Studies, 15*(1), 1294. https://doi.org/10.4102/jamba.v15i1.1294

Twigg, J. (2022). Disaster risk reduction and local institutions: Integrating indigenous practices into formal governance systems. *Environmental Hazards, 21*(3), 281–299. https://doi.org/10.1080/17477891.2022.2034411